

Representasi Polisi Humanis dalam Komunikasi Digital *The Representation of Humanistic Policing in Digital Communication*

Winda Dwi Astuti Zebua^{1*}, Syifa Astasia Utari², Jamiati KN³, Nyimas Aulia Zalma⁴, Neima Aulia⁵

^{1,2,4,5}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat, Ciputat Timur, Cireundeu, Ciputat Tim., Tangerang, Banten 15419, Indonesia.

³Universitas Malikussaleh, Cot Tengku Nie Reuleut, Muara Batu, Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 Auguts 2026

Revised 18 Auguts 2026

Accepted 25 August 2026

Available online 1 September 2026

Keywords

digital communication, representation, humanistic policing, YouTube, Stuart Hall



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The rapid development of digital communication has encouraged police institutions to utilize social media not only as a channel for disseminating information but also as a space for constructing institutional meaning and legitimacy. This study aims to examine how humanistic policing is represented in digital communication through a video published on the Resmob Brebes Police YouTube channel. A qualitative approach with a constructivist paradigm was employed using Stuart Hall's theory of representation. The object of analysis was the YouTube video entitled "77-Year-Old Grandmother Robbed and Assaulted: Within Eight Hours, the Resmob Unit of Brebes Police Successfully Arrested the Perpetrator." Data were analyzed by interpreting representational elements, including visual composition, institutional symbols, gestures, facial expressions, verbal narration, background music, cinematography, and framing. The findings reveal four major forms of representation: victim vulnerability as the moral foundation of police action, interpersonal communication as a practice of humanistic policing, professionalism represented through communication-based investigation, and a narrative shift from a law enforcement-centered narrative to a victim-centered narrative. These findings demonstrate that

police success is represented not merely through the arrest of offenders but also through victim protection, assistance, and recovery. This study contributes to the literature on digital communication by demonstrating that audiovisual narrative structures play a significant role in constructing institutional legitimacy and the representation of humanistic policing.

ABSTRAK

Perkembangan komunikasi digital mendorong institusi kepolisian memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan makna dan legitimasi institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana representasi polisi humanis dikonstruksi dalam komunikasi digital melalui video pada kanal YouTube Resmob Polres Brebes. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan metode analisis representasi berdasarkan perspektif Stuart Hall. Objek penelitian adalah video berjudul "Nenek 77 Tahun Dirampok & D14niaya, Butuh 8 Jam Tim Resmob Polres Brebes Berhasil Mengamankan P314ku". Data dianalisis melalui interpretasi terhadap unsur-unsur representasional berupa komposisi visual, simbol institusional, gestur, ekspresi, narasi verbal, musik latar, serta teknik sinematografi dan framing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi polisi humanis dibangun melalui empat bentuk utama, yaitu kerentanan korban sebagai landasan moral tindakan kepolisian, komunikasi interpersonal sebagai praktik humanisme, profesionalisme melalui investigasi berbasis komunikasi, serta pergeseran orientasi narasi dari law enforcement-centered narrative menuju victim-centered narrative. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kepolisian direpresentasikan tidak hanya melalui penangkapan pelaku, tetapi juga melalui perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi digital dengan menunjukkan bahwa struktur narasi audiovisual berperan penting dalam membangun legitimasi institusi dan representasi polisi humanis.

PENDAHULUAN

Perkembangan media digital mendorong institusi kepolisian untuk tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai organisasi publik yang dituntut mampu membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif dengan masyarakat. Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu strategi komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi,

*Corresponding Author

e-mail : winda.dwiaastuti@umj.ac.id¹, syifa.astasia@umj.ac.id², jamiatkn@gmail.com³, 23010400229@student.umj.ac.id⁴, neimaaulia1705@gmail.com⁵

membangun legitimasi institusi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian (Bullock, 2018; Graham & Avery, 2013).

Urgensi komunikasi digital tersebut tidak terlepas dari masih beragamnya persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian. Survei GoodStats bertajuk Penilaian Pengalaman Masyarakat terhadap Pelayanan Polisi Tahun 2025 menunjukkan bahwa 66,2% responden mengaku pernah mengalami pengalaman negatif ketika berinteraksi dengan polisi dalam dua tahun terakhir. Pengalaman tersebut didominasi oleh praktik pungutan liar (55,1%), lambatnya penanganan kasus (41,8%), serta perlakuan yang dinilai tidak adil (22,3%). Di sisi lain, hanya 34,4% responden yang menyatakan percaya bahwa institusi kepolisian merupakan lembaga yang bersih, profesional, dan mengayomi masyarakat, sedangkan 39,1% responden berharap polisi mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menjalankan tugasnya (GoodStats, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan citra polisi yang profesional sekaligus humanis masih menjadi tantangan penting dalam komunikasi publik kepolisian.

Dalam konteks tersebut, media sosial menjadi ruang strategis bagi institusi kepolisian untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui representasi identitas kelembagaan. Melalui berbagai konten digital, kepolisian tidak hanya menyampaikan informasi mengenai penegakan hukum, tetapi juga mengonstruksi citra sebagai institusi yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, media sosial tidak lagi dipahami semata sebagai saluran komunikasi organisasi, melainkan sebagai ruang produksi makna yang membentuk cara masyarakat memandang institusi kepolisian.

Di antara berbagai platform media sosial, YouTube memiliki karakteristik yang memungkinkan penyampaian pesan secara audiovisual sehingga mampu menggabungkan narasi, visual, musik, ekspresi, serta simbol-simbol kelembagaan dalam satu kesatuan cerita. Karakteristik tersebut menjadikan YouTube bukan sekadar media dokumentasi kegiatan institusi, tetapi juga arena pembentukan makna melalui proses representasi (Burgess & Green, 2018).

Menurut Hall (1997), representasi bukan sekadar proses merefleksikan realitas, melainkan proses produksi makna (production of meaning) melalui penggunaan bahasa, tanda, dan simbol yang dipahami bersama dalam suatu budaya. Dengan demikian, makna tidak melekat secara alamiah pada suatu objek atau peristiwa, tetapi dibangun melalui sistem representasi yang memilih, mengorganisasi, dan menghubungkan berbagai tanda sehingga menghasilkan pemaknaan tertentu. Dalam perspektif ini, media tidak dipandang sebagai cermin realitas, melainkan sebagai ruang tempat realitas dikonstruksi melalui praktik representasi. Dalam media audiovisual, proses representasi berlangsung melalui perpaduan berbagai elemen komunikasi, seperti komposisi visual, ekspresi tokoh, gestur, simbol institusional, narasi verbal, musik latar, sudut pengambilan gambar (camera angle), serta teknik penyuntingan. Seluruh elemen tersebut bekerja sebagai sistem tanda yang membentuk makna tertentu bagi audiens. Oleh karena itu, penelitian ini memandang konten YouTube Resmob Polres Brebes bukan sebagai dokumentasi yang sepenuhnya merefleksikan realitas, melainkan sebagai teks media yang mengonstruksi identitas polisi humanis melalui pemilihan dan pengorganisasian berbagai unsur representasional.

Bagi institusi kepolisian, komunikasi digital memiliki fungsi strategis karena berkaitan erat dengan pembentukan legitimasi sosial dan kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh kepolisian dapat meningkatkan transparansi, memperkuat interaksi dengan masyarakat, serta mendukung pembentukan citra organisasi apabila dikelola secara konsisten (Bullock, 2018; Crump, 2011). Meskipun penelitian mengenai komunikasi digital kepolisian terus berkembang, sebagian besar kajian masih berfokus pada efektivitas media

sosial dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan transparansi, atau memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat (Bullock, 2018; Crump, 2011).

Di sisi lain, penelitian mengenai representasi kepolisian dalam media digital masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian memandang media sosial sebagai instrumen hubungan masyarakat (public relations) atau komunikasi organisasi, bukan sebagai ruang produksi makna yang membentuk identitas institusional melalui representasi visual (Bullock, 2018). Padahal, YouTube memungkinkan integrasi berbagai elemen komunikasi seperti komposisi visual, ekspresi tokoh, gestur, musik latar, sudut pengambilan gambar (camera angle), ritme penyuntingan, dan narasi verbal dalam membangun makna tertentu. Melalui kombinasi elemen-elemen tersebut, institusi dapat mengonstruksi citra polisi sebagai pelindung, pelayan, sekaligus mitra masyarakat.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan bahwa kajian komunikasi digital kepolisian masih didominasi oleh pendekatan hubungan masyarakat, komunikasi krisis, dan kepercayaan publik, sementara kajian mengenai representasi polisi humanis melalui unsur-unsur audiovisual pada platform YouTube, khususnya dalam konteks Indonesia, masih sangat terbatas.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menganalisis media sosial kepolisian sebagai instrumen public relations, komunikasi organisasi, atau pembentukan kepercayaan publik, penelitian ini memfokuskan kajian pada representasi polisi humanis dalam konten audiovisual yang memperoleh perhatian publik secara luas. Objek penelitian adalah video "Nenek 77 Tahun Dirampok dan Dianiaya, Butuh 8 Jam Tim Resmob Polres Brebes Berhasil Mengamankan Pelaku" yang dipublikasikan melalui kanal YouTube Resmob Polres Brebes. Video tersebut dipilih karena memiliki tingkat keterlibatan publik (public engagement) yang tinggi dengan sekitar 2,1 juta penayangan dan lebih dari 1.450 komentar berdasarkan observasi peneliti pada Januari 2026. Tingginya jumlah penayangan dan interaksi menunjukkan bahwa video tersebut relevan sebagai kasus untuk menganalisis bagaimana identitas polisi humanis dikonstruksi dalam komunikasi digital menggunakan perspektif representasi Stuart Hall. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian komunikasi digital pemerintahan dengan menunjukkan bahwa citra polisi humanis dibentuk melalui konstruksi representasi audiovisual dalam media digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis untuk memahami bagaimana makna mengenai polisi humanis dikonstruksi melalui konten audiovisual pada media digital. Paradigma konstruktivis memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna yang dibentuk melalui sistem tanda, simbol, bahasa, dan praktik representasi (Hall, 1997). Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan mengukur efektivitas komunikasi, melainkan menginterpretasikan proses pembentukan makna yang direpresentasikan dalam konten YouTube.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis representasi dengan perspektif Stuart Hall. Hall (1997) menjelaskan bahwa representasi merupakan proses produksi makna (production of meaning) melalui sistem representasi (systems of representation) yang bekerja melalui bahasa, tanda, dan simbol. Dalam perspektif ini, media tidak dipandang sebagai cerminan realitas, melainkan sebagai ruang yang mengonstruksi realitas melalui proses pemilihan, penyusunan, dan pengorganisasian berbagai tanda sehingga menghasilkan makna tertentu. Perspektif representasi Hall tetap relevan dalam menganalisis komunikasi digital karena memungkinkan peneliti mengkaji bagaimana identitas dan legitimasi institusi dikonstruksi

melalui praktik representasi pada media sosial. Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa media sosial kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan citra dan legitimasi institusional melalui representasi visual (Walby & Wilkinson, 2023; Henry, 2024).

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan konsep representasi Hall ke dalam analisis terhadap unsur-unsur representasional yang terdapat pada teks audiovisual, yaitu komposisi visual, simbol institusional, gestur dan ekspresi tokoh, narasi verbal, musik latar, serta teknik sinematografi dan framing. Pemilihan unsur-unsur tersebut didasarkan pada pemikiran Hall (1997) bahwa makna tidak dihasilkan oleh satu tanda secara terpisah, melainkan melalui relasi antartanda dalam suatu sistem representasi. Oleh karena itu, komposisi visual, simbol institusional, gestur, ekspresi, narasi verbal, musik latar, serta teknik sinematografi dan framing dianalisis secara terpadu sebagai unsur-unsur representasional yang bersama-sama membangun makna mengenai identitas polisi humanis.

Dalam proses analisis, unsur-unsur representasional tersebut tidak diperlakukan sebagai elemen yang berdiri sendiri, melainkan dibaca secara kontekstual sebagai bagian dari keseluruhan narasi video. Pendekatan ini juga didukung oleh metodologi analisis visual yang dikemukakan Rose (2022), yang menekankan bahwa makna visual dipahami melalui hubungan antara komposisi visual, konteks sosial, dan praktik representasi, bukan melalui pembacaan setiap elemen secara terpisah. Dengan demikian, analisis difokuskan pada bagaimana keterpaduan unsur-unsur representasional tersebut mengonstruksi identitas polisi humanis dalam konten YouTube Resmob Polres Brebes.

Objek penelitian adalah video berjudul "Nenek 77 Tahun Dir4mp0k & D14niaya, Butuh 8 Jam Tim Resmob Polres Brebes Berhasil Mengamankan P3l4ku" yang diunggah pada kanal YouTube Resmob Polres Brebes pada 3 Desember 2025. Video tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena memiliki tingkat keterlibatan publik (public engagement) yang tinggi. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Januari 2026, video tersebut telah memperoleh sekitar 2,1 juta penayangan dan lebih dari 1.450 komentar, sehingga dipandang sebagai kasus yang kaya informasi (information-rich case) untuk mengkaji representasi polisi humanis dalam komunikasi digital.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah setiap adegan (scene) yang merepresentasikan konstruksi polisi humanis. Adegan-adegan tersebut dianalisis berdasarkan unsur visual, simbol institusional, gestur, ekspresi tokoh, narasi verbal, musik latar, serta teknik pengambilan gambar dan penyuntingan yang berkontribusi dalam pembentukan makna. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap keseluruhan isi video yang dilengkapi dengan proses dokumentasi dan transkripsi dialog. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan komunikasi digital kepolisian serta teori representasi.

Analisis data dilakukan secara interpretatif dengan mengacu pada teori representasi Stuart Hall (1997). Tahapan analisis meliputi: (1) mengidentifikasi adegan yang memuat representasi polisi humanis; (2) menginventarisasi tanda-tanda representasional berupa visual, simbol, gestur, narasi, musik, dan framing; (3) menginterpretasikan hubungan antartanda dalam membentuk makna berdasarkan perspektif representasi Stuart Hall; serta (4) menyusun sintesis mengenai konstruksi identitas polisi humanis yang direpresentasikan dalam video. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, interpretasi dilakukan secara berulang (iterative analysis) dengan membandingkan keterkaitan antarelemen representasi dalam setiap adegan serta mengaitkannya dengan literatur mengenai komunikasi digital kepolisian dan teori representasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis video "Nenek 77 Tahun Dir4mp0k & D14niaya, Butuh 8 Jam Tim Resmob Polres Brebes Berhasil Mengamankan P3l4ku" yang diunggah melalui kanal YouTube Resmob Polres Brebes pada 3 Desember 2025. Video dipilih secara purposif karena memiliki tingkat keterlibatan publik yang tinggi, dengan sekitar 2,1 juta penayangan dan lebih dari 1.450 komentar berdasarkan observasi peneliti pada Januari 2026. Secara naratif, video tidak hanya mendokumentasikan proses pengungkapan tindak pidana, tetapi membangun alur cerita yang dimulai dari kerentanan korban, proses investigasi, penangkapan pelaku, hingga pendampingan korban setelah penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada bagaimana unsur visual, narasi, simbol institusional, komunikasi interpersonal, dan teknik penyuntingan mengonstruksi representasi polisi humanis.

Representasi Kerentanan Korban sebagai Strategi Legitimasi Moral Kepolisian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa representasi polisi humanis dalam video dibangun dengan menempatkan korban sebagai titik awal narasi. Alih-alih membuka cerita melalui keberhasilan aparat atau proses penangkapan pelaku, video terlebih dahulu memperlihatkan kondisi korban yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami perampokan dan penganiayaan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, komposisi visual memperlihatkan korban sebagai pusat perhatian melalui posisi tubuh yang masih terbaring di tempat tidur perawatan, didampingi anggota keluarga dan personel kepolisian yang berinteraksi secara langsung. Susunan visual tersebut mengarahkan perhatian audiens pada dampak kemanusiaan dari tindak pidana sebelum memasuki proses penegakan hukum.



Gambar 1. Kunjungan personel Resmob Polres Brebes kepada korban di rumah sakit setelah peristiwa tindak pidana.

Sumber: Kanal YouTube Resmob Polres Brebes, (2025).

Dalam perspektif Stuart Hall (1997), representasi merupakan proses produksi makna melalui pemilihan dan pengorganisasian tanda. Latar rumah sakit, keberadaan infus, posisi korban yang masih menjalani perawatan, serta interaksi langsung antara polisi dengan korban membentuk sistem representasi yang mengonstruksi aparat sebagai institusi yang hadir memberikan perlindungan dan kepedulian. Dengan demikian, makna polisi humanis tidak dibangun melalui klaim verbal, melainkan melalui relasi antartanda yang menghubungkan tindakan kepolisian dengan pengalaman korban.

Menariknya, video tidak menonjolkan atribut kekuasaan seperti senjata, kendaraan operasional, ataupun adegan penangkapan pada bagian awal cerita. Sebaliknya, penyuntingan mempertahankan fokus pada kondisi korban dan interaksi interpersonal antara aparat dengan keluarga korban. Pilihan representasional tersebut menunjukkan bahwa legitimasi moral kepolisian dibangun melalui empati terhadap penderitaan korban. Korban tidak diposisikan sebagai objek pemberitaan semata, tetapi menjadi landasan moral yang memberikan konteks atas seluruh tindakan kepolisian pada adegan-adegan berikutnya. Dengan demikian, identitas polisi humanis dikonstruksi melalui kehadiran aparat di tengah kondisi korban yang masih memerlukan perhatian dan perlindungan, bukan melalui penonjolan simbol-simbol kewenangan.

Temuan ini memperkuat penelitian Walby dan Wilkinson (2023) yang menunjukkan bahwa media sosial kepolisian dimanfaatkan untuk membangun legitimasi institusional melalui representasi visual. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang menitikberatkan pada penggunaan Instagram sebagai media pencitraan institusi, penelitian ini menunjukkan bahwa pada platform YouTube legitimasi dibangun melalui struktur narasi yang menempatkan korban sebagai pusat cerita. Strategi ini mencerminkan pendekatan victim-centered storytelling, yaitu penyusunan narasi yang menggeser fokus komunikasi dari keberhasilan institusi menuju pengalaman korban sebagai dasar pembentukan makna. Dengan demikian, representasi polisi humanis tidak hanya dikonstruksi melalui simbol kelembagaan, tetapi juga melalui penyusunan alur audiovisual yang menghubungkan empati terhadap korban dengan tindakan penegakan hukum.

Representasi Komunikasi Interpersonal sebagai Praktik Polisi Humanis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa representasi polisi humanis dalam video dibangun melalui praktik komunikasi interpersonal antara personel kepolisian dan masyarakat. Berbeda dengan representasi aparat yang umumnya menonjolkan tindakan koersif atau simbol kewenangan, video Resmob Polres Brebes lebih banyak memperlihatkan proses dialog dalam pengumpulan informasi. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, personel kepolisian berada di tengah warga dalam suasana komunikasi yang berlangsung di lingkungan permukiman. Komposisi visual melalui medium shot memperlihatkan aparat dan masyarakat berada dalam ruang interaksi yang sama sehingga mengurangi kesan hierarkis dan menampilkan hubungan yang lebih partisipatif.



Gambar 2. Personel Resmob Polres Brebes berinteraksi dengan warga pada tahap pengumpulan informasi di lokasi kejadian.
Sumber: Kanal YouTube Resmob Polres Brebes, (2025).

Berbeda dengan representasi aparat yang sering dikonstruksi melalui tindakan koersif atau penggunaan simbol kewenangan, video Resmob Polres Brebes justru lebih banyak memperlihatkan praktik komunikasi interpersonal antara personel kepolisian dengan masyarakat. Salah satu adegan yang memperlihatkan strategi tersebut ditunjukkan pada Gambar 2, ketika personel kepolisian berada di tengah sekelompok warga dalam suasana komunikasi yang berlangsung di lingkungan permukiman. Kamera tidak hanya menampilkan aparat sebagai pusat perhatian visual, tetapi juga memperlihatkan warga yang berada dalam ruang komunikasi yang sama sehingga membangun kesan adanya interaksi yang bersifat partisipatif.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, komposisi visual memperlihatkan personel kepolisian berdiri berhadapan dengan warga yang berada pada posisi duduk maupun berdiri di halaman rumah. Penggunaan medium shot memungkinkan hubungan spasial antara aparat dan masyarakat terlihat secara utuh sehingga perhatian audiens tidak hanya tertuju pada individu tertentu, tetapi pada proses komunikasi yang sedang berlangsung. Pilihan pengambilan gambar tersebut mengurangi kesan hierarkis antara aparat dan warga, karena kamera lebih menekankan keberadaan mereka dalam satu ruang interaksi daripada menonjolkan simbol-simbol formal kepolisian.

Dalam perspektif Stuart Hall (1997), representasi dibentuk melalui hubungan antartanda yang dipilih dalam proses produksi makna. Pada adegan ini, posisi tubuh personel kepolisian yang menghadap kepada warga, arah pandang peserta komunikasi, serta pengaturan ruang yang memperlihatkan seluruh aktor dalam satu bidang visual membentuk tanda mengenai keterbukaan komunikasi. Makna tersebut tidak muncul karena adanya narasi verbal semata, tetapi dikonstruksi melalui cara kamera merepresentasikan hubungan sosial antara aparat dan masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal menjadi salah satu strategi representasi yang digunakan untuk membangun identitas polisi humanis. Humanisme dalam video tidak direpresentasikan melalui slogan ataupun klaim institusional, melainkan melalui visualisasi praktik komunikasi yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses penyelidikan. Dengan demikian, masyarakat tidak diposisikan sebagai penonton pasif atas tindakan aparat, tetapi sebagai aktor yang memiliki peran dalam penyampaian informasi yang mendukung proses penegakan hukum.

Lebih jauh, representasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi komunikasi kepolisian dalam media digital. Jika representasi kepolisian sebelumnya lebih sering menonjolkan Dalam perspektif Stuart Hall (1997), makna dibentuk melalui hubungan antartanda yang dipilih dalam proses representasi. Posisi tubuh personel yang menghadap warga, arah pandang para peserta komunikasi, serta pengaturan ruang yang memperlihatkan seluruh aktor dalam satu bidang visual membentuk representasi keterbukaan komunikasi. Humanisme tidak dikonstruksi melalui slogan atau narasi institusional, tetapi melalui visualisasi interaksi yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses penyelidikan. Dengan demikian, media tidak sekadar mendokumentasikan hubungan polisi dan masyarakat, melainkan mengonstruksi makna bahwa komunikasi menjadi bagian penting dari praktik penegakan hukum.

Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi komunikasi kepolisian dalam media digital. Jika representasi kepolisian sebelumnya lebih banyak menonjolkan keberhasilan operasi dan penangkapan pelaku, video ini memberikan ruang yang setara bagi proses dialog antara aparat dan masyarakat. Representasi tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi institusi dibangun tidak hanya melalui penggunaan kewenangan, tetapi juga melalui kemampuan menjalin hubungan interpersonal yang terbuka dan partisipatif selama proses penanganan perkara.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Henry (2024) yang menunjukkan bahwa interaksi kepolisian di media sosial berperan dalam membangun persepsi autentisitas dan legitimasi institusi di ruang digital. Namun, penelitian ini memperlihatkan dimensi yang berbeda, yaitu bahwa komunikasi interpersonal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk interaksi daring, tetapi juga direpresentasikan sebagai bagian dari proses investigasi yang membangun identitas polisi humanis. Dengan demikian, video YouTube Resmob Polres Brebes mengonstruksi komunikasi sebagai praktik representasi yang memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui narasi audiovisual.

Representasi Profesionalisme Kepolisian melalui Praktik Investigasi Berbasis Komunikasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme kepolisian dalam video direpresentasikan melalui proses investigasi yang bertumpu pada komunikasi, bukan melalui tindakan koersif. Berbeda dengan representasi aparat yang sering menonjolkan pengejaran atau penggunaan kewenangan, video Resmob Polres Brebes memberikan ruang yang cukup besar pada proses pengumpulan informasi melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3, personel kepolisian melakukan komunikasi secara langsung di lingkungan tempat tinggal pihak yang berkaitan dengan perkara. Komposisi visual melalui medium shot memperlihatkan seluruh peserta komunikasi berada dalam satu ruang interaksi dengan posisi yang relatif sejajar sehingga membangun kesan bahwa investigasi dilakukan melalui pendekatan dialogis.



Gambar 3. Personel Resmob Polres Brebes melakukan komunikasi dengan pihak yang berkaitan dengan perkara dalam proses investigasi.

Sumber: Kanal YouTube Resmob Polres Brebes, (2025)

Dalam perspektif Stuart Hall (1997), representasi dibentuk melalui proses seleksi terhadap tanda-tanda yang ditampilkan kepada publik. Pada adegan ini, kamera tidak menempatkan penangkapan sebagai fokus utama, melainkan mempertahankan perhatian pada proses komunikasi antara aparat dan pihak yang berkaitan dengan perkara. Pilihan representasional tersebut mengarahkan audiens untuk memahami investigasi sebagai proses memperoleh informasi, membangun kerja sama, dan menyelesaikan perkara secara bertahap. Dengan demikian, profesionalisme tidak dikonstruksi melalui simbol kekuasaan atau tindakan represif, tetapi melalui kemampuan aparat mengelola komunikasi sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi bukan sekadar instrumen pendukung investigasi, melainkan menjadi bagian dari representasi profesionalisme kepolisian. Representasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara dibangun melalui prosedur yang sistematis, dialogis, dan proporsional sehingga memperkuat identitas kepolisian sebagai institusi yang bekerja berdasarkan komunikasi sebelum tindakan operasional dilakukan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Henry (2024) yang menunjukkan bahwa interaksi kepolisian di media sosial berkontribusi terhadap pembentukan persepsi autentisitas dan legitimasi institusi. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya direpresentasikan sebagai bentuk kedekatan antara polisi dan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi visual yang membangun makna profesionalisme dalam proses investigasi. Dengan demikian, video YouTube Resmob Polres Brebes mengonstruksi profesionalisme kepolisian sebagai praktik komunikasi yang mendahului sekaligus menopang tindakan penegakan hukum.

Pergeseran Narasi dari Penegakan Hukum Menuju Pemulihan Korban

Temuan penelitian menunjukkan bahwa representasi polisi humanis dalam video Resmob Polres Brebes tidak berhenti pada visualisasi keberhasilan penegakan hukum. Berbeda dengan pola narasi kriminal yang umumnya menjadikan penangkapan pelaku sebagai klimaks cerita, video ini justru melanjutkan alur dengan kembali menghadirkan korban sebagai pusat perhatian setelah pelaku berhasil diamankan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 4, penyuntingan video menghubungkan adegan penangkapan dengan komunikasi lanjutan antara personel kepolisian dan korban, sehingga penangkapan tidak diposisikan sebagai akhir cerita, melainkan sebagai bagian dari proses penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan korban.



Gambar 4. Pergeseran narasi dalam video Resmob Polres Brebes. (a) Pelaku berhasil diamankan sebagai hasil proses penegakan hukum. (b) Personel kepolisian kembali berkomunikasi dengan korban setelah proses penegakan hukum berlangsung.

Sumber: Kanal YouTube Resmob Polres Brebes, (2025).

Dalam perspektif Stuart Hall (1997), makna dibentuk melalui hubungan antartanda yang disusun menjadi satu struktur representasi. Pada video ini, korban hadir secara konsisten sejak awal hingga akhir narasi, mulai dari pengenalan sebagai pihak yang terdampak tindak pidana, keterlibatan dalam proses investigasi, hingga pendampingan setelah pelaku berhasil diamankan. Penyusunan alur tersebut mengarahkan audiens untuk memaknai keberhasilan kepolisian bukan hanya sebagai kemampuan menangkap pelaku, tetapi juga sebagai kemampuan memberikan

perlindungan dan pendampingan kepada korban. Dengan demikian, representasi polisi humanis dibangun melalui kesinambungan narasi yang mempertahankan korban sebagai pusat makna dalam keseluruhan cerita.

Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari law enforcement-centered narrative menuju victim-centered narrative. Keberhasilan institusi tidak lagi direpresentasikan semata melalui tindakan represif, tetapi melalui kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat secara menyeluruh. Polisi dikonstruksi sebagai problem solver yang hadir pada setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari menerima laporan, melakukan investigasi, mengamankan pelaku, hingga memastikan kondisi korban setelah proses hukum berlangsung. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi digital kepolisian tidak hanya mendokumentasikan tindakan aparat, tetapi juga membangun pemahaman mengenai bagaimana keberhasilan institusi seharusnya dimaknai.

Temuan ini melengkapi penelitian Bullock (2018) yang menjelaskan bahwa media sosial kepolisian banyak dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi dan hubungan dengan publik melalui penyampaian aktivitas institusi. Penelitian ini menunjukkan dimensi yang berbeda, yaitu bahwa legitimasi tidak hanya dibangun melalui publikasi keberhasilan operasional, tetapi juga melalui penyusunan narasi audiovisual yang mempertahankan korban sebagai pusat representasi. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan bahwa representasi polisi humanis dibentuk melalui kontinuitas narasi korban, sehingga indikator keberhasilan kepolisian bergeser dari orientasi pada penangkapan pelaku menuju orientasi pada pemulihan sosial korban.

Temuan ini memperlihatkan bahwa representasi polisi humanis dalam komunikasi digital tidak hanya ditentukan oleh apa yang ditampilkan, tetapi juga oleh bagaimana struktur narasi disusun untuk membangun makna mengenai relasi antara institusi kepolisian dan masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi polisi humanis dalam video YouTube Resmob Polres Brebes dibangun melalui penyusunan narasi audiovisual yang menempatkan korban sebagai pusat representasi sejak awal hingga akhir cerita. Berdasarkan perspektif representasi Stuart Hall, makna mengenai polisi humanis tidak dikonstruksi melalui penonjolan simbol-simbol kekuasaan atau keberhasilan operasional semata, tetapi melalui hubungan antartanda yang menghadirkan aparat sebagai institusi yang melindungi, berkomunikasi, melakukan investigasi secara dialogis, serta mendampingi korban sepanjang proses penyelesaian perkara.

Hasil penelitian memperlihatkan empat bentuk representasi utama, yaitu: (1) kerentanan korban sebagai landasan moral tindakan kepolisian; (2) komunikasi interpersonal sebagai praktik humanisme dalam proses penyelidikan; (3) profesionalisme yang direpresentasikan melalui investigasi berbasis komunikasi; dan (4) pergeseran orientasi narasi dari law enforcement-centered narrative menuju victim-centered narrative. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kepolisian dalam komunikasi digital tidak lagi dimaknai semata sebagai keberhasilan menangkap pelaku, melainkan sebagai kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat melalui perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban.

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa representasi polisi humanis dibentuk melalui kontinuitas narasi korban (*continuity of victim-centered narrative*) sebagai strategi produksi makna dalam media digital. Temuan ini memperluas kajian komunikasi digital kepolisian yang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada citra institusi atau publikasi keberhasilan operasional, dengan menunjukkan bahwa struktur narasi audiovisual juga

berperan penting dalam membangun legitimasi institusi di hadapan publik. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu kanal YouTube kepolisian dan berfokus pada analisis representasi isi media. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan membandingkan representasi polisi humanis pada berbagai platform media sosial atau institusi kepolisian lain, serta menggabungkan analisis representasi dengan penelitian mengenai penerimaan audiens untuk memahami bagaimana makna tersebut diinterpretasikan oleh masyarakat.

REFERENSI

- Bullock, K. (2018). (Re)presenting "order" online: The construction of police presentational strategies on social media. *Policing and Society*, 28(3), 345–359. <https://doi.org/10.1080/10439463.2016.1177529>
- Bullock, K. (2018). The police use of social media: Transformation or normalisation? *Social Policy and Society*, 17(2), 245–258. <https://doi.org/10.1017/S1474746417000112>
- Burgess, J., & Green, J. (2018). *YouTube: Online video and participatory culture* (2nd ed.). Polity Press.
- Crump, J. (2011). What are the police doing on Twitter? Social media, the police and the public. *Policy & Internet*, 3(4), 1–27. <https://doi.org/10.2202/1944-2866.1130>
- GoodStats. (2025). Polisi baik, polisi buruk, bagaimana kesan di mata publik tahun 2025? GoodStats. <https://goodstats.id/publication/polisi-baik-polisi-buruk-bagaimana-kesan-di-mata-publik-tahun-2025-csN2U>
- Graham, M. W., & Avery, E. J. (2013). Political public relations and the promotion of participatory, transparent government through social media. *International Journal of Strategic Communication*, 7(4), 274–291. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2013.824885>
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.
- Henry, A. (2024). Digital ritual: Police–public social media encounters and ‘authentic’ interaction. *The British Journal of Criminology*, 64(2), 452–467. <https://doi.org/10.1093/bjc/azad036>
- Mergel, I. (2013). *Social media in the public sector: A guide to participation, collaboration, and transparency*. Jossey-Bass.
- Mohler, M., Campbell, C., Henderson, K., & Renauer, B. (2022). Policing in an era of sousveillance: A randomised controlled trial examining the influence of video footage on perceptions of legitimacy. *Policing and Society*, 32(1), 52–70. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1878169>
- ssPatton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage.
- Prabowo, T. L. (2022). Effect of Instagram post on legitimacy and reputation of Indonesian National Police. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 318–342.
- Ralph, L. (2022). The dynamic nature of police legitimacy on social media. *Policing and Society*, 32(7), 817–831. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1956493>
- Rose, G. (2022). *Visual methodologies: An introduction to researching with visual materials* (5th ed.). Sage.
- Walby, K., & Wilkinson, B. (2023). The visual politics of public police Instagram use in Canada. *New Media & Society*, 25(5), 898–920. <https://doi.org/10.1177/14614448211015805>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.